

SINOPSIS

Permasalahan utama yang mendasari pengembangan pembangunan Bandar Udara di Provinsi NTB yaitu dikarenakan kondisi Bandar Udara yang ada saat ini masih belum mampu untuk didarati oleh pesawat yang berukuran besar dan lebar. Sehingga, berdasarkan pertimbangan yang dilakukan PT. Angkasa Pura I memutuskan untuk mengembangkan Bandara yang ada saat ini menjadi Bandara yang bertaraf Internasional di Lombok Tengah. Alasan utama yang mendasari pembangunan Bandara harus dipindah yaitu dikarenakan letak atau posisi Bandara yang ada saat ini, berada di tengah kota sehingga menjadi kendala teknis bagi pembangunan Bandara. Untuk itu penulis perlu mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, yang mana nantinya dapat memberikan masukan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Untuk mengetahuinya penulis mengadakan penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Kasubdin Perhubungan Udara Provinsi NTB, Manajer Teknik PT. Angkasa Pura I, Kepala Seksi Dinas Perhubungan Provinsi NTB, dan Perwakilan masyarakat di tiga desa. Sedangkan data sekunder penelitian diperoleh di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan PT. Angkasa Pura I. Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu teknik analisis data kualitatif, selain itu penulis juga menggunakan metode stakeholder analisis yang tujuannya untuk memperjelas data kualitatif.

Sepanjang pembahasan dalam skripsi ini melalui analisa data, diperoleh suatu kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pembangunan Bandara, pada intinya sudah disetujui oleh seluruh pihak, karena sebelum dimulainya pembangunan tersebut para implementator sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan Bandara kali ini para implementator sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari pengukuran seluruh area Bandara, pengadaan dana, pembagian pelaksana kegiatan, hingga terbentuknya pengawas kegiatan. Mengenai adanya pro-kontra ditengah masyarakat terhadap rencana pembangunan Bandara di Lombok Tengah, hal itu terjadi karena hadirnya sekelompok organisasi yang menamakan diri mereka Serikat Tani (SERTA), yang dimana tujuan organisasi tersebut yaitu untuk menggagalkan kegiatan pemerintah untuk membangun Bandara Internasional di Lombok Tengah. Namun hal tersebut sudah dapat diatasi karena adanya koordinasi yang kuat antara para implementator dengan masyarakat.

Dari hasil analisa tersebut, saran yang dapat penulis berikan yaitu, para implementator lebih serius didalam melaksanakan kebijakan tersebut, agar pelaksanaannya tidak tertunda untuk yang ke dua kali. Dan bagi masyarakat untuk tetap mendukung pelaksanaan dari kebijakan pemerintah serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu.